



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
DENGAN MODUS MARK UP**
(Studi kasus Perkara No. 507/Pid.B/2024/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Helen Tryfiana
NPM. 211003742018969

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DENGAN
MODUS MARK UP**

(Studi kasus Perkara No. 507/Pid.B/2024/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Helen Tryfiana

NPM. 211003742018969

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Mohammad Solekhan, S.H., M.Hum.

NIDN: 0619046301

Anggota,

Dr. Aniek Tyaswati W.L., S.H., M.Hum.

NIDN : 0602126201

Anggota,

Endarto, S.H., M.Hum.

NIDN : 0623046102

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.

NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Abstrak	xi

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis Yuridis	10
B. Pengertian Tindak Pidana	11
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
C. Pengertian Penggelapan	21
1. Tindak Pidana Dalam Jabatan	21
2. Bentuk-Bentuk Penggelapan	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	34
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Metode Penyajian Data	36
F. Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
A. Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut kasus 507/Pid.B/2024/PN.Smg	37
B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Berdasarkan Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN.Smg	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Sidang Pembuktian Perkara

No.507/Pid.B/2024/PN.Smg..... 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Matriks Kronologis Perkara No. 507/Pid.B/2024/PN.Smg	41
---	----

ABSTRAK

Penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang oleh individu yang memegang posisi strategis di institusi, baik swasta maupun publik. Akses terhadap informasi dan kelemahan sistem internal sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dengan latar belakang hal tersebut penulis dalam hal ini akan mengkaji penelitian dengan “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dengan Modus Mark Up di Pengadilan Negeri Semarang” (Studi kasus Perkara No. 507/Pid.B/2024/PN.Smg). Perumusan masalah dalam penelitian yaitu 1) Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap pegawai yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut kasus Perkara No. 507/Pid.B/2024/PN.Smg? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan No. 507/Pid.B/2024/PN.Smg? Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif., Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Data yang terkumpul akan diuraikan dan disusun dalam bentuk laporan skripsi dan Analisa data yang digunakan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian Penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perkara No. 507/Pid.B/2025/PN.Smg dilaksanakan sesuai KUHAP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana satu tahun penjara berdasarkan Pasal 374 jo Pasal 64 KUHP. Putusan didasarkan pada aspek yuridis, seperti unsur delik yang terpenuhi, dan aspek non-yuridis, seperti sikap terdakwa selama persidangan serta kondisi terdakwa yang berbelit-belit selama persidangan.

Kata kunci: tindak pidana, penggelapan dalam jabatan